

LAPORAN
MONITORING, EVALUASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TRIWULAN II
TAHUN 2024



DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Monitoring, Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Poltekkes Kemenkes Denpasar Triwulan II Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Monitoring dan evaluasi Triwulan II bertujuan untuk menilai perkembangan pelaksanaan pelayanan informasi publik pada periode berjalan serta memastikan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa peningkatan kualitas pelayanan informasi publik memerlukan komitmen dan perbaikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta dasar dalam melakukan penguatan pelayanan informasi pada triwulan berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel di Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Denpasar, 30 Juni 2024

Ketua PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar



Ida Bagus Putu Putra Kencana, SST., M.Kes
NIP. 1910111199031001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Monitoring dan evaluasi PPID Triwulan II Tahun 2024 dilaksanakan sebagai kelanjutan dari pemantauan pada Triwulan I terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai perkembangan pelaksanaan pelayanan informasi publik serta mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperkuat guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi PPID pada Triwulan II meliputi pelayanan permohonan informasi publik, pengelolaan dan dokumentasi informasi, koordinasi dengan unit kerja dalam penyediaan data, serta pemantauan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik.

Selain itu, monitoring juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas mekanisme pelayanan informasi serta stabilitas sistem pendukung layanan.

C. Tujuan Kegiatan

Monitoring dan evaluasi PPID pada Triwulan II bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pelayanan informasi publik pada periode berjalan, menilai efektivitas pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

D. Manfaat

Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta memperkuat koordinasi antar unit kerja dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan.

BAB II

TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI

1. Rekomendasi yang Diberikan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Triwulan II Tahun 2024, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan guna mendukung optimalisasi pelayanan. Rekomendasi tersebut antara lain penguatan koordinasi dalam penyediaan data, peningkatan stabilitas dan pemanfaatan sarana pendukung pelayanan, serta penguatan pemahaman petugas terhadap regulasi keterbukaan informasi publik.

Rekomendasi ini diberikan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

2. Tindak Lanjut yang Dilakukan

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, dilakukan peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyediaan data dan informasi publik guna mempercepat proses pelayanan. Selain itu, dilakukan pemantauan terhadap kondisi sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi untuk memastikan seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Upaya ini merupakan langkah penguatan yang dilakukan secara bertahap untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada periode berikutnya.

BAB III

PENCAPAIAN DAN PERBAIKAN

1. Pencapaian dari Tindak Lanjut

Berdasarkan tindak lanjut yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2024, pelayanan informasi publik tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi antar unit kerja menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya, sehingga proses penyediaan data menjadi lebih tertata dan sistematis.

Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan juga semakin optimal, sehingga mendukung kelancaran proses pelayanan informasi kepada masyarakat.

2. Masalah yang Masih Dihadapi

Meskipun terdapat perkembangan positif, masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian, antara lain keterbatasan jumlah petugas dalam menangani permohonan informasi yang cukup beragam serta beberapa kendala teknis pada sistem dan jaringan pada waktu tertentu. Hal ini menjadi dasar untuk melakukan penguatan lebih lanjut pada triwulan berikutnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Monitoring dan evaluasi PPID Triwulan II Tahun 2024 menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik di Poltekkes Kemenkes Denpasar berjalan dengan baik dan menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan periode sebelumnya. Upaya penguatan koordinasi dan optimalisasi sarana pendukung layanan memberikan kontribusi terhadap stabilitas pelayanan informasi publik.

2. Saran

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, disarankan agar dilakukan penguatan kapasitas petugas secara bertahap, peningkatan stabilitas sistem pendukung layanan, serta penguatan koordinasi antar unit kerja guna mendukung pelayanan informasi publik yang lebih efektif dan responsif pada triwulan berikutnya.